BAB IV

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI TKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

(Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

A. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami TKI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk mewujudkannya ibadah kepada Allah SWT yang menimbulkan suatu akibat hukum kekelurgaan diantara keduanya, yaitu suami dan istri. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewjiban masing-masing antara suami dan istri bisa terpenuhi, maka akan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*

Di antara hak dan kewajiban suami-istri yaitu adanya nafkah lahir dan batin. Karena hal tersebut selalu disepelekan dalam keluarga pada zaman sekarang ini, padahal itu merupakan kunci yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan, dari sebagian masyarakatnya hanya mementingkan nafkah lahir tanpa memandang bahwa nafkah batinpun juga perlu dipenuhi. maka dari itu islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin pada setiap keluarga atau pasangan suami istri. Seperti menafkahi keluarga berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi maupun non materi, bergaul dan berkumpul antara suami-istri dengan anak.

Jumlah penduduk desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berjumlah 15.026 penduduk. Dalam penelitian ini diambil 4 (empat) keluarga dari keseluruhan penduduk tersebut untuk diwawancarai tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang suaminya menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Pada umumnya para TKI adalah pekerja lapisan bawah yang tidak mempunyai cukup modal dari aspek pendidikan yang memang mayoritas adalah lulusan sekolah menengah ke bawah karena terhalang biaya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. lagipula menjadi TKI merupakan cara yang instan untuk memperoleh kesuksesan, karena nilai mata uang asing rata-rata jauh lebih tinggi dari nilai tukar rupiah.

Dari hasil data yang telah diperoleh bahwasannya pasangan suami istri yang lebih memilih menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini rata-rata berpendidikan rendah dikarenakan faktor ekonomi dimana untuk menunjang kehidupan keluarganya agar bisa selalu tercukupi. Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan di Desa Kranji dimana dari 8.778 orang hanya 6 yang merupakan berpendidikan tinggi selebihnya adalah tamatan SMA 3.007 orang, SMP 4.308 orang, dan SD 443 orang. Hal ini tentunya berpengaruh pada pemikiran masyarakat di Desa Kranji mengenai menjalani hidup atau cara hidup mereka. Sehingga mereka mengabaikan aspek aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikologis dimana kepuasan batin berkurang. Hasil wawancara dari 4 (empat) orang yang telah diwawancarai menyatakan bahwa sudah adanya kesepakatan dan persetujuan antara suami dan istri untuk suaminya menjadi seorang TKI agar bisa tercukupi kebutuhan hidupnya karena dengan suaminya menjadi seorang TKI keluarga itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini diperjelas dengan adanya Kaidah Fiqh yang menerangkan:

الضَرُوْرَةُ تَبِيْحُ المَحْضُوْرَات

"Kemadharatan membolehkan yang madharat (dilarang)"

Maksud dari kaidah ini adalah, dikarenakan madarat maka sesuatu yang dilarang menjadi dibolehkan.[1] Meskipun mengorbankan kebutuhan nafkah batin antara suami dan istri, yaitu suami tidak bisa mengumpuli (hubungan seksual) istrinya dengan baik. Akan tetapi, dengan suami menjadi seorang TKI pemenuhan hak-hak istri menjadi terpenuhi dan kewajiban suami terlaksana secara lahiriyah. Hak-hak istri yang dipenugi oleh kewajiban suami adalah hak mendapatkan perlindungan dan kebutuhan rumah tangga.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami TKI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Hak adalah suatu kekuasaan atau kepemilikan seseorang yang harus diperoleh dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus

[1] Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakasanakan dan sudah menjadi sebuah keharusan. munculnya hak dan kewajiban keluarga (suami istri) dalam agama islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. bahwa seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk membina keluarga atau rumah tangga, maka laki-laki dibebankan sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang harus siap menyediakan papan, sandang, dan pangan bagi keluarganya. Berbeda dengan perempuan yang tidak dibebankan tugas seperti halnya laki-laki, karena perempuan harus mengurus dan mengasuh anaknya. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami. Hal ini tercantum pada Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam penelitian ini, berjalan dengan baik, dimana suami selalu mengirimkan nafkah (uang) untuk istri dan keluarganya, Meskipun nafkah secara batin menjadi terabaiakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 ayat (1) bahwasannya “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataannya dalam keluarga yang suaminya menjadi seorang TKI, mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangganya. Adapun dampak positif dan negatifnya adalah:

1. Dampak Positif
   a. Penghasilan materi

      Kebutuhan rumah tangga keluarga yang suaminya TKI, selalu terpenuhi atau bisa dikatakan tercukupi. Karena dengan menjadi seorang TKI kebutuha ekonomi bisa terjamin dan bisa menghasilkan banyak uang sehingga pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam segi materi terpenuhi.

   b. Kehidupan rumah tangga sejahtera

      Dengan penghasilan materi yang lebih banyak menjadikan kehidupan rumah tangga yang lebih baik, yang pada awalnya kehidupannya jauh dari kata cukup dan kehidupan rumah tangganya menjadi bahagia dan sejahtera.

   c. Pendidikan anak terjamin

      Dengan orang tuanya menjadi seorang TKI, menjadikan pendidikan anak bisa terjamin, sehingga anak bisa berpendidikan yang layak.

Apa yang dilakukan oleh suami yang menjadi seorang TKI, dalam hal ini pemenuhan kewajiban oleh suami dan hak untuk istri secara nafkah lahiriyah terpenuhi. Sebagaimana firman allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَآسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.[2]

2. Dampak Negatif

1. Keharmonisan keluarga berkurang

Keluarga yang suaminya menjadi seorang TKI, tentunya dalam hal ini kehidupan rumah tangganya keharmonisannya berkurang dikarenakan suami tidak bisa memenuhi nafkah batin pada istrinya.

Hal ini juga berdampak pada komunikasi antara suamin dan istri menjadi berkurang sedangkan dalam Pasal 1 undang-undang No. Tahun 1974 yang menjelaskan, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dari penjelasan keluarga-keluarga yang suaminya menjadi seorang TKI, bahwasannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, seperti menafkahi batin kepada istrinya atau mengauli istri (hubungan seksual), memang dikatakan tidak bisa terpenuhi, karena jarak antara suami dan istri berjauhan, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 jo to Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya "Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-

[2] Departemen Agama Ri, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain". Karena untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahamah*, harus bisa terpenuhi keduanya yaitu nafkah lahiriyah maupun nafkah batiniyah. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi keluarga yang suaminya menjadi seorang TKI, dikarenakan istri sudah rela ditinggal suaminya dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Dalam hal ini, merujuk pada asas-asas perkawinan, yaitu asas kesukarelaan, dan asas persetujuan, yang mana pada asas kesukarelaan ini tentunya merupakan asas yang terpenting dalam sebuah perkawinan.[3] Dengan adanya asas Kesukarelaan tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan masalah keluarga atau istri yang suaminya menjadi seorang TKI, tentunya ini sudah jelas bahwasannya sudah adanya asas kesukarelaan dalam keluarga tersebut, yang menyatakan istri rela ditinggal suaminya menjadi seorang TKI. Dan Asas Persetujuan ini merupakan persetujuan kedua belah pihak, asas ini merupakan asas yang terpenting juga dalam perkawinan karena dalam melakukan sebuah perkawinan kalau tidak ada persetujuan pada kedua belah pihak maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Penjelasan Asas Persetujuan tersebut dapat dikaitkan dalam permasalahan keluarga atau istri yang suaminya menjadi seorang TKI, bahwa dalam hal ini suami atau istri sudah

[3] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan bersama dan ini tentunya sudah jelas adanya Asas Persetujuan pada keluarga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id